

BAB V

PENUTUP

Pengaruh Ikhwanul Muslimin terhadap PKS di Indonesia cukup besar. Terutama pengaruh IM dalam pembentukan ideologi PKS. Mendalamnya pengaruh IM dalam bangunan pemikiran politik PKS ini dapat dimengerti karena pemikiran-pemikiran IM telah disemai semenjak awal masa-masa embrional partai ini. Kesamaan Manhaj dan Ideologi PKS dan IM semakin menguatkan pengaruh IM kepada PKS. Dan dapat dibuktikan oleh Tarbiyah sebagai pemikiran IM berkembang di LDK hingga PKS sekarang. Tidak hanya manhaj, ideologi, serta Tarbiyah. PKS dan IM sama dalam memaknai demokrasi dan syura. PKS dan IM menggunakan itu sebagai strategi dalam konteks kebangsaan.

Kesamaan dalam memaknai demokrasi ditunjukkan dalam proses dan penerapan konsep demokrasi (pemerintah) dan trias politica oleh keduanya. Dan dalam menjalankan fungsi parlemen dengan sistem syura dapat dilihat dari substansi dan perilaku PKS dan IM di DPR (parlemen). Sejak bernama Partai Keadilan Sejahtera dan masuk dalam parlemen pada tahun 2004 dan 2009, PKS sudah berkontribusi besar dalam memasukkan nilai-nilai Islam dalam RUU seperti RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi, RUU tembakau, RUU Sistem Pendidikan Nasional.

PKS tidak hanya fokus dalam memasukkan nilai-nilai Islam ke DPR dan undang-undang akan tetapi lewat kontribusinya dalam menjalankan fungsi legislasi bukan hanya dalam bidang agama dan pendidikan tapi seluruh bidang

kehidupan masyarakat. Karena tujuan mereka masuk dalam parlemen adalah untuk menjalankan amanah rakyat jadi mereka pro aktif mendengar yang disuarakan rakyat. Salah satu contohnya adalah keteguhan PKS dalam memperjuangkan penolakan terhadap kenaikan BBM. Karena tiga alasan, *Pertama*, kondisi sosial dan perekonomian tidak mendukung, kenaikan harga BBM akan meningkatkan jumlah rakyat miskin. *Kedua*, kenaikan harga BBM bersubsidi untuk seluruh segmen masyarakat apalagi dengan angka yang relatif cukup tinggi akan meningkatkan beban hidup sehari-hari rakyat secara signifikan. Dan yang *ketiga*, kenaikan harga BBM bersubsidi juga akan merusak prospek ekonomi yang sudah mengalami perlambatan yang serius.

Sama halnya dengan Ikhwanul Muslimin yang sejak tahun 2000 dan 2005 sudah masuk parlemen lewat calon independennya berusaha dalam tidak hanya memasukkan nilai-nilai Islam dalam undang-undang tapi lebih jauh untuk menyejahterakan rakyat dengan mereka sebagai wakil rakyat pemegang amanah.

PKS tidak mencoba mengadaptasi atau mengubah ideologi IM dengan menyesuakannya dengan konteks realitas kebangsaan Indonesia yang menganut Pancasila. Ideologi Islam ala IM tetap dijadikan acuan sepenuhnya. Penyesuaian dan adaptasi hanya dilakukan pada aplikasi atau penerapannya, bukan kandungan ideologinya. Konsistensi pada ideologi Islam ini terlihat pula dari tidak disebutnya kata "Pancasila" dalam dokumen PKS.

PKS dan IM yang bermula dari gerakan sosial-keagamaan menjadi gerakan politik. Mereka memiliki cita-cita mendirikan pemerintah Islam. Akan tetapi

terbentuk oleh realitas negara mereka yang menganut sistem demokrasi dan berbentuk negara bangsa. Oleh sebab itu, IM dan PKS dalam langkah politiknya lebih berdamai dengan sistem demokrasi dan menjadikan demokrasi sebagai strategi untuk memasukkan nilai-nilai Islam dalam produk undang-undangnya.

Adapun cara transmisi ideologi/pemikiran politik Ikhwanul Muslimin terhadap PKS ada tiga tahap: *pertama*, lewat beasiswa Timur Tengah yang diberikan Arab Saudi untuk membendung euforia Revolusi Iran tahun 1979 yang beragama syiah bukan Islam terhadap negara dan masyarakat muslim, dan karena mahasiswa muslim di Indonesia sangat bersemangat dalam mempelajari literatur keislaman. Kedua, kerjasama bilateral dalam bidang pendidikan antara Arab Saudi dan Indonesia dengan membangun Lembaga Ilmu Pengetahuan Agama Islam (LIPIA) di Jakarta pada 1980, yang merupakan cabang dari Universitas Islam Muhammad Ibn Sa'ud di Riyadh. Ketiga, lewat penerjemahan buku-buku karya ulama-ulama Ikhwanul Muslimin yang menjadi buku wajib dan rujukan bagi